

Paradiplomasi Provinsi Jawa Barat terhadap Provinsi Sichuan dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 di Jawa Barat

Suhendrik¹, R.M.T. Nurhasan Affandi², Deasy Silvy Sari³

Transborder*

Abstract

The occurrence of the COVID-19 pandemic has created a global health hazard that not only threatens health aspects, but also has an impact on various aspects of the economy, social, education, culture, tourism and so on. As one of the efforts to overcome this, Indonesia and its sub-national entities need to realize synergized and coordinated health diplomacy in order to be able to ensure the health security of citizens. This research was carried out to analyze the paradiplomacy achieved by the Province of West Java and the Province of Sichuan-China in tackling COVID-19. Using a descriptive method, this study presents an analysis of how the Covid-19 Pandemic has become a global security issue that has an impact on various aspects of life, as well as Indonesia's health diplomacy efforts which are supported by the active role of local governments in pursuing para-diplomacy, especially para-diplomacy of West Java Province with the Province of West Java. Sichuan China. From the results of the analysis, it can be described the ways, efforts, and endeavors of the Province of West Java in seizing global opportunities, providing services to local residents, encouraging decentralization, and achieving personal interests.

Keywords : International Relations; Health Security; Covid-19; Paradiplomacy

Abstrak

Terjadinya pandemi COVID-19 telah menimbulkan bahaya kesehatan global yang bukan saja mengancam aspek kesehatan, namun memberikan dampak pada penurunan di berbagai aspek baik ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan sebagainya. Sebagai salah satu upaya untuk menanggulangnya, Indonesia beserta para entitas subnasional perlu mewujudkan diplomasi kesehatan yang bersinergi dan terkoordinasi agar mampu menjamin keamanan kesehatan warga. Riset ini dilaksanakan untuk menganalisis paradiplomasi yang ditempuh Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok dalam menanggulangi COVID-19. Dengan menggunakan metode deskriptif, riset ini menyajikan analisis tentang bagaimana Pandemi Covid-19 menjadi isu keamanan global yang memberikan dampak di berbagai aspek kehidupan, serta upaya diplomasi kesehatan Indonesia yang didukung oleh peran aktif pemerintah Daerah dalam menempuh paradiplomasi, khususnya paradiplomasi Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Sichuan Tiongkok. Dari hasil analisis maka dapat dideskripsikan cara, upaya, dan ikhtiar dari Provinsi Jawa Barat dalam meraih peluang global, menyediakan pelayanan terhadap warga daerah, mempromosikan desentralisasi, dan meraih kepentingan personal.

Kata Kunci : Hubungan Internasional; Keamanan Kesehatan; Covid-19; Paradiplomasi

¹ Magister Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung,

Email : suhendrik@gmail.com

² Dept Hubungan internasional, FISIP Unpad,

Email : affandi@unpad.ac.id

³ Pusat Studi Keamanan dan Internasional,

Email : deasy.silvy@unpad.ac.id

* Jurnal Hubungan Internasional Fisip UNPAS,

Email: transborders.journal@unpas.ac.id

PENDAHULUAN

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) merupakan permasalahan global yang sedang dihadapi oleh lebih dari 200 negara di dunia (Setiati & Azwar, 2020: 85). Sejak pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, RRT pada 31 Desember 2019, COVID-19 terus menyebar dengan cepat ke berbagai negara sehingga WHO menyatakan COVID-19 sebagai bahaya kesehatan global. Saat ini, negara-negara di dunia sama-sama berusaha untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus dengan berbagai strategi dan kebijakannya masing-masing. Pandemi COVID-19 telah menguji kemampuan dan ketahanan negara dalam mengatasi situasi krisis. Negara tidak hanya dihadapkan pada ancaman utama di bidang kesehatan, melainkan juga menghadapi berbagai dampak permasalahan yang terjadi baik di bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya.

Untuk mengatasi pandemi COVID-19, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara negara dengan negara, maupun antara negara dengan berbagai lembaga yang aktif dalam arena kesehatan global. Setiap negara dan berbagai aktor terkait dituntut untuk mampu merundingkan tindakan kolektif apa yang perlu ditempuh dan bagaimana mengatur kelembagaan yang akan berperan sebagai eksekutor sehingga tantangan dan permasalahan pandemi dapat segera diatasi (McInnes & Lee, 2012: 49-50).

Penanggulangan pandemi oleh Indonesia dalam kaitannya dengan Hubungan Internasional dilakukan salah satunya melalui langkah diplomasi. Diplomasi kesehatan merupakan proses pembentukan kebijakan negara, organisasi antar pemerintah, dan aktor non-negara dalam menegosiasikan tanggapan terhadap tantangan kesehatan dengan menggunakan konsep dan mekanisme kesehatan dalam pembentukan kebijakan dan strategi negosiasi untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, atau sosial lainnya.

Diplomasi kesehatan yang ditempuh Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19 ditempuh melalui pendekatan bilateral dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam membuka akses, menjalin komitmen dan

mengatasi berbagai kendala yang dihadapi terkait maraknya kebutuhan semua negara terhadap ketersediaan vaksin. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama Indonesia dengan 14 negara mulai dari bantuan logistik dan teknik untuk penanganan COVID-19 sampai dengan kerja sama riset vaksin dan pengembangan produksinya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Sebagai wujud dari upaya diplomasinya, Indonesia berhasil mendapatkan vaksin Sinovac (Tiongkok), Pfizer (AS), dan AstraZeneca (Inggris). Diplomasi vaksin Indonesia secara bilateral yang utama adalah memastikan ketersediaan jatah 20 persen dari populasi yang disediakan oleh WHO (Wangke, 2021: 10).

Keberhasilan diplomasi kesehatan yang dilakukan Indonesia juga ditunjang oleh upaya diplomasi dari lembaga-lembaga yang bersifat non-negara dan lembaga dibawah negara, salah satunya melalui paradiplomasi yang dilakukan Provinsi Jawa Barat sebagai aktor subnasional Indonesia. Paradiplomasi bagi Kuznetsov (2016) merupakan suatu bentuk komunikasi politik untuk mencapai keuntungan ekonomi, budaya, politik, atau jenis keuntungan lain yang intinya terdiri dari tindakan-tindakan pemerintah daerah yang mandiri dengan aktor-aktor pemerintah dan non pemerintah luar negeri (Kuznetsov, 2014: 30-31).

Provinsi Jawa Barat sudah dikenal sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang aktif dalam menjalankan kerjasama luar negeri. Sebelum terjadinya wabah pandemi, Provinsi Jawa Barat secara konsisten telah menjalin kerjasama di berbagai bidang dengan entitas subnasional dari negara-negara pada kawasan ASEAN, Australia, Jepang, termasuk RRT. Hal menarik yang perlu dikaji lebih jauh adalah bagaimana Provinsi Jawa Barat mampu memanfaatkan ruang paradiplomasi untuk mendukung penanggulangan pandemi dan memulihkan perekonomian Jawa Barat. Dalam hal ini, riset dilaksanakan untuk menganalisis bagaimana paradiplomasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19 di Jawa Barat.

METODE

Riset ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan secara mendalam mengenai paradiplomasi yang dilakukan Provinsi Jawa Barat terhadap Provinsi Sichuan, Tiongkok dalam menanggulangi COVID-19 di Jawa Barat. Penulis mengumpulkan data primer dan sekunder dengan melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Sumber data yang dikumpulkan meliputi tema data mengenai: cara, upaya, dan ikhtiar dari Provinsi Jawa Barat dalam meraih peluang global; menyediakan pelayanan terhadap warga daerah; mempromosikan desentralisasi; dan meraih kepentingan personal.

PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 Sebagai Isu Kesehatan Global

Globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai perspektif kehidupan, termasuk pergeseran pandangan terhadap berbagai isu yang menjadi perhatian bersama. Isu kesehatan global sebenarnya bukan sebuah hal yang baru, melainkan isu yang telah lama dikenal meskipun kurang mendapat perhatian khusus dari dunia internasional. Namun seiring dengan maraknya globalisasi, isu kesehatan terus berkembang karena sifatnya yang melintasi batas negara sehingga untuk menanganinya diperlukan kesepakatan antar negara dalam forum multilateral.

Fenomena *health security* sebagai permasalahan global semakin menguat dengan kemunculan COVID-19 yang sampai saat ini terus menyebar dan menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. COVID-19 telah menciptakan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi yang memaksa setiap negara untuk menempuh langkah ekstrim dalam upaya menekan laju penyebaran pandemi. Hampir seluruh negara, baik negara maju ataupun berkembang, memiliki situasi yang tidak pasti dalam hal penanganan COVID-19.

Perbedaan sikap dari setiap negara dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 tentunya memberikan hasil yang berbeda pula terhadap penanganan pandemi yang bisa

dicapai. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor rezim kekuasaan juga memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah strategi dan kebijakan suatu negara. RRT yang sering disebut sebagai negara asal dari penyebaran COVID-19, misalnya melaksanakan *lockdown* di Kota Wuhan sebagai langkah untuk menahan penyebaran pandemi (Aida, 2021). Sejak Januari hingga Juni 2020, Wuhan ditutup dari mobilitas orang yang hendak masuk atau keluar kota. Walau kebijakan *lockdown* tersebut memicu terjadinya penurunan di berbagai sektor untuk warga lokal, namun siasat itu terbukti berhasil dalam mengatasi penyebaran pandemi. Hingga saat ini, RRT menjadi salah satu dari sedikit negara yang memiliki kisah sukses dalam menanggulangi pandemi.

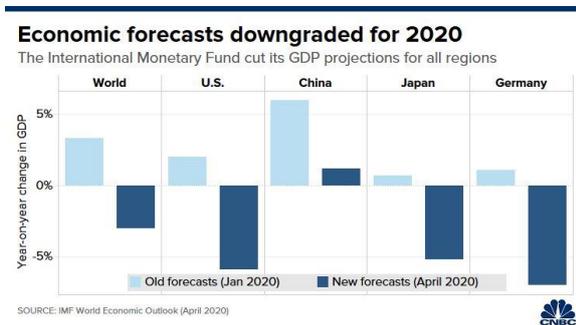
Situasi yang bertolak belakang justru terjadi di AS pada masa kepemimpinan Donald Trump. Sejak COVID-19 terdeteksi di negaranya pada 15 Februari 2020, jumlah kasus di AS terus mengalami peningkatan dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek. Hingga saat ini, jumlah kasus COVID-19 di AS masih berada pada urutan tertinggi di dunia yang mencapai lebih dari 40 juta kasus dengan jumlah korban kematian di atas 700 ribu orang (Worldometer, 2021).

Gambaran dari kondisi yang dialami RRT dan AS memberikan bukti bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi ancaman kesehatan global yang bukan saja membahayakan kelangsungan hidup manusia, melainkan berpengaruh terhadap banyak aspek lainnya. Pada satu sisi, kebijakan *lockdown* yang diambil pemerintah RRT memang terbukti berhasil menurunkan angka pandemi secara signifikan. Namun pada sisi lain, *lockdown* juga menimbulkan resiko berupa penurunan aktivitas di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, pendidikan, pariwisata dan sebagainya.

Pada aspek perekonomian global, berbagai lembaga riset kredibel di dunia telah memprediksi penurunan kondisi ekonomi global. Pada tahun 2020, ekonomi dunia diprediksi mencapai -1,1% (JP Morgan), -2,2% (EIU), -1,9% (Fitch EIU), -2,2% (Fitch), serta -3% (IMF). Prediksi-prediksi ekonomi ini sangat mengkhawatirkan masyarakat di dunia (Azwar Iskandar et al., 2020).

Gambar 1.

Penyusutan Ekonomi Global Menurut IMF Tahun 2020

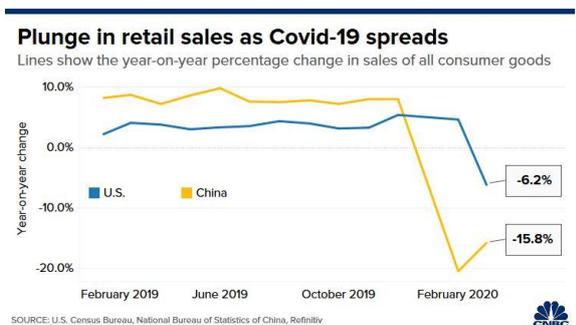


Sumber : CNBC Indonesia

Menurunnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan indikator terpuruknya industri jasa. Industri jasa adalah sumber utama pertumbuhan dan lapangan kerja bagi banyak negara, termasuk AS dan RRT, dua negara dengan ekonomi dan pasar konsumen terbesar di dunia.

Gambar 2.

Kondisi Industri Jasa AS dan RRT Tahun 2020



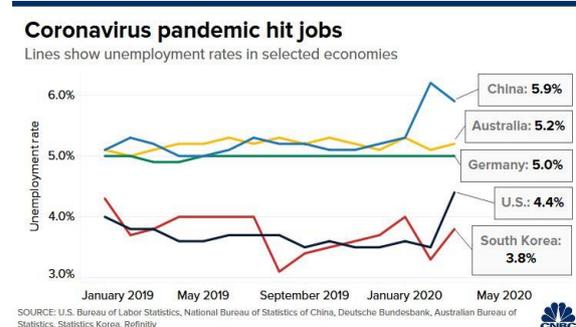
Sumber : CNBC Indonesia

Keterpurukan ekonomi dan merosotnya dunia perindustrian berdampak secara langsung terhadap meningkatnya jumlah pengangguran. Berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja, tingkat pengangguran AS pada bulan Maret adalah sebesar 4,4% menjadi yang tertinggi sejak Agustus 2017. Selain AS, negara maju lain seperti Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan juga mencatat kenaikan tingkat pengangguran. Meningkatnya

jumlah pengangguran dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.

Angka Pengangguran di Beberapa Negara



Sumber : CNBC Indonesia

Indonesia juga tidak luput dari serangan COVID-19. Sebagai salah satu negara dengan penduduk yang besar, Indonesia memang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi dengan adanya pandemi COVID-19 yang mampu menyebar secara cepat. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan kasus dan korban kematian yang terjadi akibat COVID-19. Hingga saat ini, Indonesia telah mencapai lebih dari 4 juta kasus dengan korban kematian mencapai lebih 140 ribu orang (Worldometer, 2021). Hal ini menggambarkan bahwa pandemi COVID-19 berpotensi untuk menimbulkan banyak kematian yang akan mengurangi populasi nasional dan berdampak terhadap luar batas negara.

Ancaman terhadap penurunan populasi nasional merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian Kementerian Pertahanan. Pada awal penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia, Menteri Pertahanan telah menempuh upaya untuk mewujudkan ketersediaan sarana kesehatan dengan mengoptimalkan peran rumah sakit TNI dan rumah sakit yang secara resmi berada di bawah penanganan Kementerian Pertahanan untuk memberikan pelayanan terhadap korban pandemi. Upaya ini merupakan sebuah langkah positif yang diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap ketersediaan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi penderita COVID-19, sehingga dapat mencegah terjadinya kematian yang berdampak terhadap penurunan

populasi nasional (Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Wawancara, 19 Oktober 2021).

Untuk menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyusun beberapa strategi yang akan diterapkan secara konsisten untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar dalam mengatasi pandemi COVID-19. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19, Ahmad Yurianto, mengungkapkan bahwa strategi pertama adalah melakukan tindakan kampanye terhadap gerakan masker untuk masyarakat, khususnya saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Strategi kedua adalah tindakan penelusuran kontak (*tracing*) dari orang yang dinyatakan positif COVID-19, dan strategi ketiga adalah memberikan edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri bagi orang yang terindikasi positif baik dengan gejala maupun tanpa gejala (Wibowo, 2020).

Terdapat banyak resiko baru yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 secara global. Selain resiko terhadap kesehatan yang menjadi ancaman utama, resiko lain yang tidak kalah berbahaya adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat akibat keterpurukan ekonomi yang terjadi karena adanya pembatasan aktivitas di berbagai bidang. Terjadinya fenomena baru dalam era pandemi seperti penerapan WFH bagi pekerja, pembelajaran jarak jauh pada sektor pendidikan, penutupan fasilitas umum dan tempat pariwisata dan berbagai pembatasan lainnya terjadi secara global sehingga setiap negara merasakan dampak pandemi yang serupa berupa penurunan berbagai aspek yang mempengaruhi terhadap kestabilan politik dan ekonomi dari negara tersebut.

Diplomasi Kesehatan Indonesia

Arah kebijakan luar negeri sebuah negara harus sesuai dengan kepentingan nasionalnya agar mendukung upaya mencapai tujuan bersama. Pada tanggal 7 Januari 2021, di depan pers, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menyebutkan ada 5 prioritas diplomasi Indonesia pada tahun 2021. Kelima prioritas tersebut adalah membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau atau pembangunan berkelanjutan, memperkuat

sistem perlindungan WNI, berkontribusi memajukan berbagai isu kawasan dan dunia, serta menjaga kedaulatan dan integritas wilayah RI (Menteri Luar Negeri, Pernyataan Pers Tahunan, 2021).

Dari kelima prioritas tersebut, perhatian khusus perlu ditujukan pada prioritas pertama, yaitu membangun kemandirian bangsa dan kesehatan nasional karena berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang telah memberikan pukulan telak terhadap negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 telah merusak kesehatan dunia dan menimbulkan dampak luar biasa pada perekonomian nasional negara-negara di seluruh dunia, seperti minusnya pertumbuhan ekonomi meningkatnya pengangguran dan bertambahnya kemiskinan.

Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kerjasama global untuk memperkuat infrastruktur dan tata kelola kesehatan, ketahanan ekonomi, serta pentingnya multilateralisme. Untuk tetap dapat berkontribusi pada perubahan dunia, diplomasi Indonesia harus antisipatif, adaptif, dan gesit. Hal ini sejalan dengan 3 resolusi WHO terkait inisiasi kesehatan / pandemi di Indonesia yaitu (Menteri Luar Negeri RI, 2021):

1. Adanya solidaritas global untuk melawan pandemi COVID-19;
2. Kesehatan Global dan Kebijakan Luar Negeri: memperkuat ketahanan sistem kesehatan melalui layanan kesehatan yang Terjangkau untuk semua orang;
3. Kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan yang dihadapi negara akibat pandemi COVID-19 untuk mendukung rantai pasokan global.

Diplomasi kesehatan Indonesia dilakukan melalui pendekatan bilateral dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. dengan tugas utama membuka akses pasar dan mengatasi berbagai kendala yang muncul. Meskipun di dalam berbagai forum internasional Indonesia berulang kali menyebutkan tentang pentingnya kesetaraan akses terhadap alat kesehatan, namun pada kenyataannya Indonesia harus bermanuver memperjuangkan kepentingannya. Melalui

pendekatan secara bilateral, diplomasi vaksin yang dilakukan Indonesia dalam kasus COVID-19 telah memberikan hasil nyata dan efektif (Kompas, 2021).

Melalui pendekatan bilateral, Indonesia berhasil mendapatkan vaksin *Sinovac* (China), *Pfizer* (AS), dan *AstraZeneca* (Inggris). Diplomasi vaksin Indonesia secara bilateral yang utama adalah memastikan ketersediaan jatah 20 persen dari populasi yang disediakan oleh WHO. Upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan vaksin merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan kerjasama yang menguntungkan dalam hal memenuhi kebutuhan vaksin tanpa harus melakukan investasi di bidang penelitian.

Kebijakan pragmatis Indonesia dalam memanfaatkan peluang diplomasi kesehatan dengan RRT menandai semakin dekatnya hubungan kedua negara. Kebijakan ini ditempuh dengan mengacu pada keberhasilan RRT dalam mengatasi pandemi di negaranya sendiri. Kerjasama yang dilakukan antara RRT dengan Indonesia melalui Biofarma dalam penyediaan Vaksin Sinovac memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi warga negara Indonesia yang berjumlah lebih dari 260 juta jiwa. Jumlah kebutuhan tersebut tentunya sulit untuk bisa dipenuhi hanya dengan mengandalkan pembelian dari negara lain. Dengan demikian, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas ketersediaan vaksin melalui produksi dalam negeri. Oleh karena itu, Biofarma selain menangani urusan kerjasama dengan RRT dalam hal penyediaan Vaksin Sinovac, juga berupaya untuk menghasilkan produksi sendiri sehingga kapasitas vaksin yang diperlukan dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Hal itu tentu saja menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus dihadapi Indonesia. Pertama, munculnya sikap tidak senang Amerika Serikat yang dikenal sebagai pesaing RRT saat ini. Di tengah persaingan negara besar antara Amerika Serikat dan RRT, kedekatan terhadap salah satu kubu akan memberikan dampak terhadap hubungan dengan kubu yang lain. Dalam hal ini, Indonesia harus memiliki strategi dan kebijakan yang tepat agar diplomasi kesehatan yang dijalin dengan RRT tidak menimbulkan

masalah berupa terganggunya hubungan dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Oleh karena itu, Indonesia juga berupaya mewujudkan kerjasama dalam penyediaan vaksin dengan Amerika Serikat. Hal ini perlu ditempuh mengingat diplomasi kesehatan yang dijalin antara Indonesia dengan RRT dapat memberikan konsekuensi bagi hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang memiliki persaingan dengan RRT. Dengan demikian, upaya diplomasi kesehatan dengan Amerika Serikat ini menjadi sebuah langkah untuk menunjukkan sikap Indonesia sebagai negara netral yang memiliki politik bebas aktif.

Paradiplomasi Provinsi Jawa Barat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlunya penyesuaian kewenangan dari pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun kebijakan hubungan luar negeri dan diplomasi oleh pemerintah pusat juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah sehingga peluang kerjasama internasional antara pemerintah daerah dengan lembaga luar negeri semakin bertambah besar.

Pelaksanaan paradiplomasi Provinsi Jawa Barat terus berjalan dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang berlaku. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup besar sesuai dengan posisi strategisnya yang dekat dengan ibu kota sehingga menjadi jalur yang sering dilalui. Pada masa pandemi COVID-19, kondisi strategis Jawa Barat tersebut menimbulkan resiko yang cukup besar bagi terjadinya penyebaran kasus di Jawa Barat. Sebagai catatan, kasus pertama COVID-19 di Indonesia terjadi pada warga Depok yang menjadi salah satu kota yang berpenduduk padat di Jawa Barat.

Kasus pandemi COVID-19 di Jawa Barat mencapai 17% dari keseluruhan kasus yang terjadi secara nasional. Untuk menghadapi permasalahan dimaksud, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mewujudkan berbagai upaya

yang diarahkan untuk menekan angka penyebaran kasus dan meminimalisir dampak yang ditinggalkannya. Berdasarkan keterangan Koordinator Satgas COVID-19 Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengedepankan kolaborasi pentahelix dan pendekatan inovasi dalam upaya pengendalian COVID-19. Kolaborasi telah menghasilkan beberapa terobosan di antaranya:

- Meningkatkan kapasitas infrastruktur kesehatan untuk menekan tingkat keterisian tempat tidur (BOR). Pada masa PPKM, Satgas menyediakan 7.727 pusat isolasi desa/kelurahan dan juga memanfaatkan bangunan-bangunan pemerintah/tni/polri serta hotel;
- Menyiapkan Posko Oksigen Jawa Barat untuk menanggulangi kekurangan oksigen di rumah sakit maupun pasien isoman di Jawa Barat.
- Melakukan terobosan lainnya dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan online telekonsultasi/telemedisin dan layanan pendistribusian obat/vitamin bagi pasien isoman, melalui aplikasi pikobar (Koordinator Satgas COVID-19 Jawa Barat, Wawancara, 10 Oktober 2021).

Upaya yang dilaksanakan secara konsisten ini membuahkan hasil, sehingga tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit Jawa Barat berada pada angka 27,94% jauh dibawah standard WHO yaitu 60% (data 17 agustus 2021). Laporan zona peta resiko kab/kota di Jawa Barat periode 9 - 15 agustus 2021 juga menunjukkan bahwa sudah tidak ada kab/kota yang berada pada zona resiko tinggi/merah. Selain infrastruktur kesehatan, kualitas dan kapasitas testing, tracing/tracking juga terus ditingkatkan dengan merekrut relawan lebih dari 17.000-an orang agar rasio *tracing* tetap terjaga. Saat ini rasio kasus aktif per tracer berada pada angka 5:1 (Koordinator Satgas COVID-19 Jawa Barat, Wawancara, 10 Oktober 2021).

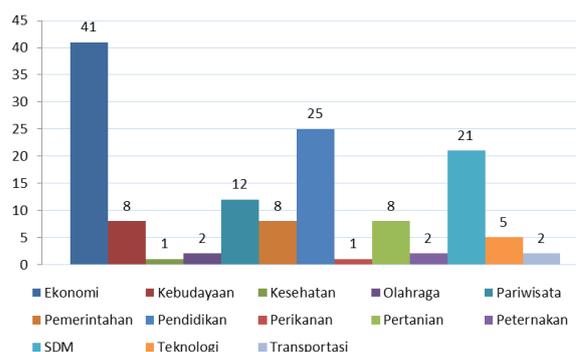
Saat ini, Jawa Barat telah menjalin paradiplomasi dengan 8 negara yang terdiri dari Australia Selatan sebanyak 22 kegiatan, Belgia 10 kegiatan, Inggris 8 kegiatan, Jepang 22 kegiatan, Korea Selatan 6 kegiatan, Maroko 9

kegiatan, Sudan 11 kegiatan dan RRT 48 kegiatan. Dengan demikian, paradiplomasi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berjalan dengan baik meski di tengah pandemi. Hal ini memang perlu dilakukan mengingat kerjasama global adalah salah satu poin yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan pandemi.

Adapun bidang kegiatan dari paradiplomasi yang dilaksanakan mencakup aspek ekonomi, kebudayaan, pariwisata, kesehatan, olahraga, pemerintahan, pendidikan, perikanan, pertanian, peternakan, SDM, teknologi dan transportasi sebagaimana dapat digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 4.

Jumlah kegiatan Paradiplomasi Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Bidang



Sumber : Pengolahan Data Primer Bagian Kerjasama Luar negeri Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan gambar tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menempuh strategi dan kebijakan yang tepat dalam melaksanakan kerjasama luar negeri yang ditujukan untuk menangani dampak COVID-19, khususnya dalam mengatasi pertumbuhan ekonomi yang sangat terpuruk dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jenis kerjasama di bidang ekonomi yang mencapai 41 kegiatan, disusul bidang pendidikan 25 kegiatan dan pembinaan SDM sebanyak 21 kegiatan.

Dari berbagai kerjasama tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mempersiapkan program kerjasama luar negeri yang diharapkan mampu

mewujudkan pemulihan ekonomi disertai dengan persiapan peningkatan kapasitas wawasan dan kemampuan SDM Pemerintahan serta pelaku usaha yang akan menjadi faktor pendukung dari tercapainya peningkatan ekonomi Jawa Barat. Selain itu, aspek pendidikan juga mendapat perhatian yang cukup besar dengan mempertimbangkan pentingnya kualitas SDM ke depan yang akan menjadi penentu bagi pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat.

Paradiplomasi Provinsi Jawa Barat terhadap Provinsi Sichuan-Tiongkok dalam penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat

Paradiplomasi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok sudah ditempuh sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri. Dalam hal ini, prosedur kerjasama yang ditempuh mengacu pada ketentuan sebagai berikut: (a) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (b) sesuai dengan bidang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia; (c) mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); (d) tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri; (e) tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara; (f) berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak; (g) memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat; (h) mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Terjalinnnya paradiplomasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok tidak lepas dari situasi hubungan internasional yang baik antara Indonesia dengan RRT. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, Indonesia dan RRT saat ini sudah menjalin kerjasama di berbagai bidang, termasuk dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Dengan

demikian, kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan provinsi Sichuan-Tiongkok sudah sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia sehingga pelaksanaan paradiplomasi tersebut memenuhi tuntutan dalam hal pemberdayaan dan pengembangan potensi kerjasama internasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pelaksanaan paradiplomasi Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok dapat dipandang sebagai representasi dari kebijakan kerjasama luar negeri Indonesia.

Perjanjian kerjasama antara Jawa Barat dengan Sichuan-Tiongkok dibuat dalam MoU Persetujuan antara Pemerintah Provinsi Sichuan-Tiongkok dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat RI tentang Hubungan Provinsi Bersaudara (*Sister Province*) yang ditandatangani di Bandung pada tanggal 9 Mei 2016. Maksud dari Persetujuan ini adalah untuk membentuk kerjasama Provinsi Bersaudara di antara Pihak Pemerintah Provinsi Sichuan-Tiongkok dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat RI sesuai dengan batas kewenangan, pendanaan dan kemampuannya secara teknis dalam rangka mendorong kesejahteraan dan pembangunan atas prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan (Dokumen Persetujuan Antara Pemerintah Provinsi Sichuan-Tiongkok Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat RI Tentang Hubungan Provinsi Bersaudara (*Sister Province*), 2016).

Pada awalnya, kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Provinsi Sichuan-Tiongkok dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencakup bidang pendidikan, pariwisata, perekonomian (perdagangan dan investasi), pertanian, dan pengembangan ilmu serta kapasitas SDM. Dalam perkembangannya, kerjasama tersebut terus mengalami peningkatan dengan adanya bantuan di bidang kesehatan yang ditujukan untuk membantu penanganan COVID-19 di Jawa Barat.

Sesuai dengan tujuan kerjasama dalam bentuk Provinsi Bersaudara yang diarahkan pada pencapaian kesejahteraan dan mendorong pembangunan daerah, maka langkah awal yang ditempuh adalah mempromosikan pariwisata dan seni budaya dari masing-masing daerah yang diharapkan mampu mendorong peningkatan aspek wisatawan daerah dan mancanegara. Kerjasama antara Provinsi

Sichuan-Tiongkok dengan Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.

Kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Provinsi Sichuan-Tiongkok dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

No	Kerjasama	Status
1	Program Sister School	Proses
2	Bantuan Sarana Kesehatan COVID-19	Terlaksana
3	Program pelatihan dan magang bagi lulusan SMK	Proses
4	Program promosi dan fasilitasi pariwisata	Terlaksana
5	Pertukaran seni dan budaya	Terlaksana
6	Program promosi dan fasilitasi perdagangan dan investasi dua arah dan hubungan perdagangan lainnya	Proses
7	Program business matching	Proses
8	Kerjasama dalam pengelolaan manajemen kebun binatang (Pengembangbiakan panda)	Terlaksana
9	Transfer pengetahuan dalam teknologi penyediaan produk dan jasa	Proses
10	Fasilitasi kerja sama dalam bidang pelatihan manajemen pengelolaan sumber daya air bagi ASN Jabar	Proses
11	Program Fasilitasi 300 Doktor Jabar	Proses
12	Program pelatihan Bahasa Mandarin bagi ASN Jabar	Proses

Sumber : Biro Kerjasama Luar Negeri Pemprov Barat Tahun 2021

Peluang Global yang Diraih Jawa Barat

Peluang global yang dapat diraih Jawa Barat atas kerjasamanya dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok tentu mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan RRT yang mulai menjelma menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. RRT memiliki kepentingan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa mereka mampu menjadi mitra kerjasama internasional yang dapat diandalkan dan memberikan keuntungan bagi negara yang menjalin kerjasama. Dengan demikian, kerjasama *Sister Province* yang dijalin dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok akan

mendapat perhatian dan dukungan dari RRT untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai negara besar yang patut diperhitungkan dalam dunia internasional.

Keuntungan lain yang dapat diperoleh Jawa Barat adalah peluang untuk mengadaptasi keunggulan yang terdapat di Provinsi Sichuan-Tiongkok melalui kerjasama di berbagai aspek, baik perekonomian, pendidikan, kesehatan, pariwisata maupun kemampuan SDM. Belajar dari Provinsi yang sudah maju tentunya menjadi poin penting yang dapat mendorong terwujudnya provinsi Jawa Barat yang unggul dari segi kolaborasi dan inovasi. Dari segi pendidikan, Jawa Barat menjalin kerjasama dalam program pelatihan dan magang bagi lulusan SMK yang tentunya akan menambah wawasan dan pengalaman yang berharga untuk bisa dikembangkan dalam dunia kerja secara nyata.

Selanjutnya, program promosi dan fasilitasi perdagangan juga akan memberikan peluang bagi pengenalan produk lokal di luar negeri yang akan membuka akses bagi pendistribusian produk lokal yang akan menghasilkan tambahan Pendapatan Daerah. Untuk kompetensi dalam bidang bisnis, kerjasama Program Business Matching diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan wawasan pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya. Sedangkan pada aspek peningkatan kemampuan SDM pemerintahan, kerjasama yang dilakukan dalam hal pelatihan manajemen pengelolaan SDM akan mampu memperkuat kompetensi aparatur SDM Jawa Barat sehingga mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik.

Pelayanan Terhadap Warga Jawa Barat

Dalam kaitannya dengan bantuan untuk penanganan pandemi COVID-19, Provinsi Sichuan-Tiongkok sebagai bagian dari RRT yang aktif menunjukkan peran dalam mengatasi masalah pandemi COVID-19 di dunia internasional, memberikan bantuan berupa sarana kesehatan untuk dimanfaatkan di masa pandemi. Dalam hal ini, tercatat bahwa Provinsi Sichuan-Tiongkok telah memberikan bantuan berupa Masker Bedah @100 CHINA PEOPLE R sebanyak 20.000 Paket untuk didistribusikan bagi masyarakat Jawa Barat.

Pemberian bantuan masker dari Provinsi Sichuan-Tiongkok tersebut merupakan salah satu bentuk upaya nyata dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan dukungan terhadap penanganan pandemi COVID-19. Menurut Analis Luar negeri Pemerintah Provinsi Jawa Barat, permohonan terhadap bantuan masker dimaksud diajukan secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat dan mendapat tanggapan positif dengan diberikannya bantuan masker sebanyak 40.000 paket yang diperuntukan bagi masyarakat Jawa Barat sebanyak 20.000 paket dan sisanya diserahkan kepada BNPB untuk didistribusikan ke wilayah lain yang membutuhkan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai sudah mampu memanfaatkan situasi kerjasama yang telah terjalin dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok dengan melakukan diplomasi kesehatan yang menghasilkan bantuan masker bukan saja untuk masyarakat Jawa Barat, melainkan juga kepada masyarakat di luar Jawa Barat yang didistribusikan melalui BNPB (Analis Kerjasama Luar Negeri Pemprov Jabar, Wawancara, 9 Oktober 2021).

Selain bantuan alat kesehatan yang disalurkan ke setiap Rumah Sakit Di Jawa Barat dengan mempertimbangkan situasi dan kebutuhan setiap daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat yang terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) serta memberikan dukungan terhadap Pengusaha Kecil dan Menengah melalui bantuan tunai yang bisa dimanfaatkan untuk menambah permodalan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Wawancara, 11 Oktober 2020).

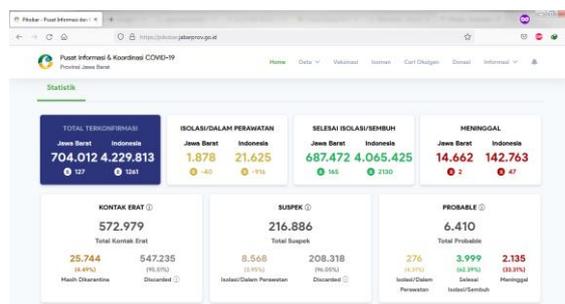
Hal ini sesuai dengan program penanganan dampak sosial dan ekonomi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memberikan pelayanan berupa bantuan tunai dan non tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi, termasuk bantuan ekonomi bagi para pengusaha pada skala usaha mikro dan kecil di bidang industri, pariwisata, transportasi dan sebagainya. Dalam hal ini, pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi bertujuan untuk meminimalisir resiko kerentanan sosial dan ekonomi, serta memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan agar masyarakat dapat bertahan di

masa pandemi (Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Kibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (COVID-19), 2020).

Dari segi pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan inovasi teknologi informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat) sebagai sebuah media digital yang dapat dimanfaatkan untuk memantau situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di Jawa Barat, memberikan informasi terkait ketersediaan BOR bagi korban COVID-19 dan ketersediaan oksigen di berbagai daerah. Aplikasi Pikobar merupakan salah satu produk inovasi Jawa Barat yang berhasil dicapai melalui kerjasama dengan Inggris.

Gambar 4.5.

Interface Aplikasi Pikobar



Sumber : <https://pikobar.jabarprov.go.id/>

Promosi Desentralisasi

Sesuai dengan MoU kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sichuan-Tiongkok dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tujuan yang ingin dicapai adalah membentuk *sister province* dalam rangka mendorong kesejahteraan dan pembangunan atas prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Melihat dari berbagai bidang kerjasama yang telah dijalin, maka peluang yang ingin diraih Jawa Barat adalah terpromosikannya berbagai produk baik pariwisata, seni budaya dan produk makanan dan kerajinan lokal melalui berbagai event kerjasama yang dilaksanakan dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok.

Program promosi dan pertukaran seni budaya antara Provinsi Sichuan-Tiongkok dengan Jawa Barat dilakukan untuk memperkenalkan potensi wisata, seni dan budaya di masing-masing provinsi agar mampu menarik wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan berupa lomba fotografi, kunjungan investasi Sichuan-Tiongkok ke Jawa Barat pada *West Java Investment Summit*, Pendirian *Pojok Sister Province* di Sichuan-Tiongkok sebagai sarana promosi pariwisata dan budaya, dan keikutsertaan masing-masing provinsi pada event-event yang diselenggarakan oleh Sichuan-Tiongkok dan Jawa Barat (Analisis Kerjasama Luar Negeri Pemprov Jabar, Wawancara, 9 Oktober 2021).

Dari segi popularitas, Jawa Barat tentu saja memperoleh keuntungan mengingat Provinsi Sichuan adalah bagian dari RRT yang menjadi salah satu negara terbesar dan terkuat di Asia, atau bahkan di dunia. Pelaksanaan event-event kerjasama bukan tidak mungkin akan mampu menarik perhatian dunia internasional sehingga secara tidak langsung akan membantu mempromosikan Jawa Barat ke manca negara. Pendirian *Pojok Sister Province* di Sichuan-Tiongkok sebagai sarana promosi pariwisata dan budaya juga dapat membuka peluang untuk Jawa Barat agar lebih dikenal, bukan hanya di kawasan Sichuan melainkan juga kepada seluruh wisatawan maupun pihak lain yang berkepentingan dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok pada khususnya dan RRT pada umumnya.

Kepentingan Personal

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pembangunan suatu daerah akan menghasilkan citra positif bagi kepala daerahnya masing-masing. Bagaimana kebijakan para kepala daerah sampai ke publik melalui media di tengah *social/physical distancing* memperlihatkan kecenderungan bahwa sosok kepala daerah tetap menjadi sorotan utama dalam menilai implementasi kebijakan yang berlaku di tengah publik. Dalam hal ini, media memiliki peran dalam mengangkat wacana tentang kepala-kepala daerah yang dianggap paling berhasil dalam merespons COVID-19. Administrasi Jawa Barat di bawah pimpinan Ridwan Kamil misalnya, dinyatakan paling berhasil dalam

membangun *public engagement dan transparency* (Fachriansyah, 2020).

Dalam kaitannya dengan paradiplomasi yang dilaksanakan dengan provinsi Sichuan-Tiongkok, Ridwan Kamil menyatakan bahwa prioritas utama dari pemerintah daerah provinsi Jawa Barat adalah memastikan keselamatan warga Jawa Barat. Untuk mencapai hal tersebut, ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana di bidang kesehatan menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempuh berbagai upaya baik melalui kerjasama baik di dalam maupun luar negeri dalam bentuk diplomasi kesehatan untuk memastikan ketersediaan berbagai sumber daya yang diperlukan (Ridwan Kamil, Wawancara, 17 Nopember 2021).

Selama ini, menurut Ridwan Kamil, gerakan diplomasi di daerah memang terkesan tidak merata karena tidak semua kepala daerah memiliki skill dan passion yang diperlukan untuk menjalin hubungan kemitraan dengan pihak asing. Padahal dengan banyaknya aktivitas paradiplomasi, maka peluang daerah untuk dapat bersaing dalam arena global akan lebih terbuka dengan adanya promosi desentralisasi yang pada ujungnya akan memberikan hasil yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan terhadap warga (Ridwan Kamil, Wawancara, 17 Nopember 2021).

Pernyataan Gubernur Jawa Barat di atas memang sejalan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Bagi para kepala daerah, pelaksanaan paradiplomasi masih menjadi aktivitas langka karena keterbatasan sumber daya yang diperlukan untuk menjalin konektivitas dengan pihak luar. Hanya sedikit daerah yang berhasil menjalin paradiplomasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Dan sejauh ini, kepala daerah masih menjadi aktor yang paling dominan dalam menentukan bagaimana pemerintahannya mampu menjalin kerjasama secara terencana dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kepentingan personal yang berada di balik keberhasilan seorang pimpinan daerah tentunya merupakan sebuah hal yang lumrah mengingat setiap individu memiliki harapan untuk mewujudkan visi dan idealismenya dalam

skala yang lebih luas. Untuk mencapai hal tersebut, seorang kepala daerah bukan saja dituntut untuk mampu memimpin dan mengkoordinasikan segenap jajarannya dalam mewujudkan berbagai program, strategi dan kebijakan yang harus dicapai, melainkan juga mampu beradaptasi dalam era global, memanfaatkan teknologi mutakhir serta media untuk mengoptimalkan peran media untuk meningkatkan citra kepemimpinan dan keberhasilan pencapaian kinerja di mata publik.

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah menjadi isu keamanan kesehatan global yang telah ditetapkan WHO sebagai ancaman darurat kesehatan global yang tidak hanya mengancam keselamatan manusia dan membahayakan populasi nasional, melainkan juga melintasi batas-batas negara dan menimbulkan banyak resiko baru yang berdampak pada munculnya tantangan dan permasalahan di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, transportasi, dan sebagainya.

Mengacu pada keberhasilan RRT dalam penanggulangan pandemi, Pemerintah Indonesia menempuh upaya diplomasi kesehatan melalui kerjasama penyediaan Vaksin Sinofak dengan RRT untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi warga negara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menempuh strategi dan kebijakan yang tepat dalam melaksanakan kerjasama luar negeri untuk mencegah dan menangani dampak pandemi COVID-19 dengan rincian kerjasama di bidang ekonomi sebanyak 41 kegiatan, bidang pendidikan 41 kegiatan dan pembinaan SDM 21 kegiatan.

Kerjasama yang sudah dilaksanakan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok adalah kerjasama dalam bidang pariwisata, seni budaya dan kesehatan yang ditujukan untuk mendorong pembangunan daerah, serta mampu mengadaptasi keunggulan yang terdapat di Provinsi Sichuan-Tiongkok melalui kerjasama di berbagai aspek, baik perekonomian, pendidikan, kesehatan, pariwisata maupun kemampuan SDM.

Pada aspek peningkatan pelayanan terhadap warga daerah, paradiplomasi Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok

telah menghasilkan bantuan sarana kesehatan yang dimanfaatkan masyarakat di dalam dan di luar Jawa Barat, melainkan juga kepada masyarakat di luar Jawa Barat yang didistribusikan melalui BNPB.

Program promosi dan pertukaran seni budaya antara Provinsi Sichuan-Tiongkok dengan Jawa Barat dilakukan sebagai promosi desentralisasi dengan memperkenalkan potensi wisata, seni dan budaya di masing-masing provinsi agar mampu menarik wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan berupa lomba fotografi, kunjungan investasi Sichuan-Tiongkok ke Jawa Barat pada *West Java Investment Summit*, pendirian *Pojok Sister Province* di Sichuan-Tiongkok sebagai sarana promosi pariwisata dan budaya, dan keikutsertaan masing-masing provinsi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Sichuan dan Jawa Barat.

Paradiplomasi Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok mampu membentuk persona kepala daerah sehingga memiliki citra yang baik di mata publik. Hal ini ditunjang juga oleh kemampuan dan pengalaman kepala daerah dalam mewujudkan berbagai program dan kebijakannya, termasuk dalam mewujudkan paradiplomasi yang bermfaat bagi percepatan pembangunan daerah.

Peran aktor sub-nasional dalam mewujudkan paradiplomasi yang sejalan dengan kerangka kerjasama luar negeri pemerintah perlu didukung dengan sistem manajemen dan tata kelola yang baik sehingga pemerintah daerah dan pemerintah pusat mampu bersinergi dan berkoordinasi secara efektif dalam mewujudkan berbagai program kerjasama luar negeri yang saling mendukung, saling mengisi dan berkesinambungan.

Selanjutnya Paradiplomasi yang dilaksanakan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Sichuan-Tiongkok perlu terus dikembangkan pada berbagai aspek yang berpotensi untuk menyelesaikan berbagai dampak dan permasalahan yang terjadi pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Dalam dunia global yang sudah memasuki era Industri 4.0 saat ini, para aktor nasional dan sub-nasional dapat belajar dari kemajuan RRT

dalam bidang teknologi yang dapat menunjang percepatan pembangunan di berbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Web

Aida, N. R. (2021). No Title. Kompas. (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/04/080000165/6-fakta-wuhan-dari-kasus-pertama-covid-19-hingga-gelar-festival-musik?page=all>)

CNBC Indonesia. (2020). Ini 7 Bukti COVID-19 Telah Bikin Ekonomi Dunia Hancur Lebur. 25-04-2020. <https://www.cnbc-indonesia.com/news/20200425183739-4-154449/ini-7-bukti-covid-19-telah-bikin-ekonomi-dunia-hancur-lebur>

Kuznetsov, A. (2014). Theory and Practice of Paradiplomacy. In Theory and Practice of Paradiplomacy. Routledge. (<https://doi.org/10.4324/9781315817088>)

Menteri Luar Negeri RI. (2021). Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2021. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2048/berita/pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-tahun-2021>

Wibowo, A. (2020). Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19. Covid19.Go.Id. <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>

Worldometer. (2021). COVID-19 Coronavirus Pandemic. (<https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>)

Artikel Jurnal

Azwar Iskandar, Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid -19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 7, 625–638.

Dokumen Resmi

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi kibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19), (2020) (testimony of Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Kemenkes Harus Siap Jalani Diplomasi Kesehatan di Era New Normal.

Dokumen Persetujuan antara Pemerintah Provinsi Sichuan RRT dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat RI tentang Hubungan Provinsi Bersaudara (Sister Province), (2016).

Artikel Koran

Fachriansyah, R. (2020). Covid-19 Study Shows High Public Trust in West Java Administration. The Jakarta Post.

Kompas. (2021). Diplomasi Vaksin di Tengah Pandemi. 07-01-2021, 6.

Buku

McInnes, C., & Lee, K. (2012). Global Health and International Relations. Polity Press.

Setiati, S., & Azwar, M. K. (2020). COVID-19 and Indonesia. 52(1), 84–89.

Wangke, H. (2021). Diplomasi Vaksin Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XIII(1).